

---

## STUDI KOORDINASI DEWAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR KEPADA DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN DAN KOTA DALAM MENJAGA KETAHANAN PANGAN DAERAH

Abd Rachim AF<sup>1</sup> dan Zulkifli<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Keuangan dan Perbankan Syari'ah, Fakultas Ekonomi, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Indonesia. Email: [rachim346@gmail.com](mailto:rachim346@gmail.com)

<sup>2</sup>Ilmu Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Indonesia.

**History:** submitted June 12, 2021; revised June 29, 2021; accepted June 29, 2021.

---

### ABSTRACT

---

*Food in everyday life is a basic need. Without the fulfillment of food, of course it cannot grow and develop properly. Given that most of the availability of nutritional intake is obtained from various types of food sources. Starting from rice, vegetables, fruits, side dishes, milk to meat and fish. In East Kalimantan Province there is a Food Security Council (DKP) of East Kalimantan Province as a Food Security Working Group Team at the East Kalimantan Province level and builds synchronization and harmonization of food security with Regency/City DKP, through planned and implemented coordination as stated in the Governor's Regulation East Kalimantan Number 12 of 2017 concerning the Establishment of the East Kalimantan Provincial Food Security Council. The purpose of the study was to determine the form and aspects relating to the coordination of the DKP of East Kalimantan Province to the DKP of the Regency and City in Maintaining Regional Food Security. This study uses qualitative research methods with descriptive nature, with data analysis using the Interactive Model Data Analysis. The results showed that the coordination occurred in a vertical and horizontal pattern. The vertical context is of course the coordination carried out by the DKP of the East Kalimantan Provincial Government to the Regency/City DKP, and vice versa. While horizontal coordination in order to support vertical coordination. The point is that the DKP of the Provincial Government of East Kalimantan and the DKP of the Regency/City must obtain support from stakeholders who have main tasks and functions related to meeting food needs and reducing areas that have food insecurity. These stakeholders include the Department of Agriculture with regard to food production, the Department of Animal Husbandry with regard to livestock production, the Department of Health with regard to nutritional value and public health, as well as a number of other Regional Apparatus Organizations (OPD), to support from the Village Government where more agricultural locations are available, and supported by the Working Group Team. The harmony of stakeholders is very important considering that food security is multidisciplinary, multi sectoral and multidimensional.*

**Keywords:** *Coordination, food security.*

---

### ABSTRAK

---

*Pangan dalam kehidupan sehari-hari merupakan kebutuhan pokok. Tanpa pemenuhan pangan, tentu tidak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Mengingat sebagian besar ketersediaan asupan gizi diperoleh dari berbagai jenis sumber makanan. Mulai dari beras, sayuran, buah-buahan, lauk pauk, susu hingga daging dan ikan. Di Provinsi Kalimantan Timur terdapat Dewan Ketahanan Pangan (DKP) Provinsi Kalimantan Timur sebagai Tim Kelompok Kerja ketahanan pangan pada tingkat Provinsi Kalimantan Timur dan membangun sinkronisasi dan harmonisasi ketahanan pangan dengan DKP Kabupaten/Kota, melalui koordinasi yang terencana dan dilaksanakan sebagaimana tercantum di dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 2017*

---

*Tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Timur. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk dan aspek yang berkenaan dengan Koordinasi DKP Provinsi Kalimantan Timur kepada DKP Kabupaten Dan Kota Dalam Menjaga Ketahanan Pangan Daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan sifat deskriptif, dengan analisis data menggunakan Analisis Data Model Interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi terjadi berpola vertikal dan horizontal. Konteks vertikal tentu koordinasi yang dilakukan oleh DKP Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada DKP Kabupaten/Kota, begitupun sebaliknya. Sedangkan koordinasi horizontal dalam rangka mendukung koordinasi vertikal. Maksudnya adalah bahwa DKP Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maupun DKP Kabupaten/Kota harus memperoleh dukungan dari stakeholders yang memiliki tugas pokok dan fungsi berhubungan dengan terpenuhinya kebutuhan pangan dan mengurangi daerah yang memiliki kerawanan pangan. Stakeholders tersebut diantaranya Dinas Pertanian berkenaan dengan produksi pangan, Dinas Peternakan berkenaan dengan produksi ternak, Dinas Kesehatan berkenaan dengan nilai gizi dan kesehatan masyarakat, serta sejumlah Organisasi Perangkat daerah (OPD) lain, hingga dukungan dari Pemerintah Desa dimana lokasi pertanian lebih banyak tersedia, serta di dukung oleh Tim Kelompok Kerja. Keharmonisan stakeholders menjadi sangat penting mengingat ketahanan pangan bersifat multidisiplin, multi sektor dan multidimensi.*

**Kata Kunci:** Koordinasi, ketahanan pangan.

Copyright © 2020 JPBM. All rights reserved.

---

## PENDAHULUAN

Pangan dalam kehidupan sehari-hari merupakan kebutuhan pokok setiap makhluk hidup, tidak terkecuali manusia yang memiliki nilai rasa dan pilihan kesukaan yang berbeda. Tanpa pemenuhan pangan, manusia tentu tidak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Mengingat sebagian besar ketersediaan asupan gizi diperoleh dari berbagai jenis sumber makanan yang termasuk dalam kategori pangan. Mulai dari beras, sayuran, buah-buahan, lauk pauk, susu hingga daging dan ikan.

Pemenuhan kebutuhan dan ketersediaan pangan di Indonesia, masih harus didukung oleh pasokan impor. Kondisi tersebut bukan karena ketersediaan di dalam negeri tidak ada, namun lebih kepada kuantitas atau jumlah serta kualitas dengan benih dan bibit yang unggul. Padahal Indonesia adalah negara yang *"gemah ripah loh jinawi dengan makna* tentram dan makmur serta sangat subur tanahnya (Humas, 2018:1)".

Sebagai upaya memaksimalkan potensi pangan di Indonesia, maka Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pertanian menggalakkan Program Ketahanan Pangan dengan membentuk Badan Ketahanan Pangan (BKP). Menurut BKP Republik Indonesia (2021) melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan bahwa *"penyelenggaraan pangan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan"*.

Sebagai upaya implementasi kebijakan pada tingkat daerah, lanjutnya pada tingkat Provinsi Kalimantan Timur keberadaan BKP didukung dengan keberadaan Dewan Ketahanan Pangan (DKP) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Timur, dimana pada konsideran menyebutkan bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan

pangan di Kalimantan Timur yaitu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, perlu dilakukan upaya-upaya untuk mendukung terwujudnya kondisi tersebut yang bersifat koordinatif dan terpadu antar instansi terkait. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kalimantan Timur yakni melakukan pembentukan Dewan Ketahanan Pangan, sebagaimana Peraturan Gubernur tersebut. Mengenai kedudukan DKP, pada Pasal 2 ayat (2) dijelaskan bahwa DKP Provinsi Kalimantan Timur merupakan lembaga non struktural serta merupakan wadah koordinasi yang dipimpin oleh Gubernur selaku Ketua DKP Provinsi Kalimantan Timur.

Dengan demikian, maka DKP Provinsi Kalimantan Timur merupakan wadah koordinasi untuk mendukung Program Ketahanan Pangan dari Pemerintah Pusat pada wilayah Provinsi yang harus didukung oleh daerah Kabupaten/Kota. Sehingga dipandang perlu untuk melakukan penelitian ini dalam rangka memastikan terjadinya ketahanan pangan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur untuk mendukung visi dan misi Gubernur yakni Berani untuk Kaltim Berdaulat, dalam hal ini berdaulat dalam ketahanan pangan untuk pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

## KERANGKA TEORI

Mengacu pada tema dan judul yang diangkat pada penelitian ini, maka perlu disajikan sejumlah literatur pustaka dari para ahli baik yang bersumber dari buku, jurnal ilmiah, maupun artikel *online* yang berkualitas. Selain itu, peneliti juga lengkapi dengan sumber normatif, dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

### 1. *Studi Koordinasi*

Studi Koordinasi, merupakan terdiri dari 2 (dua) suku kata yakni “studi” dan “koordinasi”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *online*, kata “studi” dalam kata benda berarti “penelitian ilmiah; kajian; telaahan”. Sedangkan untuk kalimat aktif dari kata benda tersebut berarti “pendekatan untuk meneliti gejala sosial dengan menganalisis satu kasus secara mendalam dan utuh”. Sedangkan menurut Connolly (2004) studi adalah proses mengkaji, dan menemukan metode dalam melakukan penyelidikan yang lebih detail untuk mempelajari bidang atau fenomena secara mendalam. Sehingga dalam penelitian ini adalah suatu penelitian ilmiah mengenai bentuk koordinasi yang dilakukan oleh Dewan Ketahanan Pangan (DKP) Provinsi Kalimantan Timur kepada DKP Kabupaten/Kota di wilayah bumi etam Provinsi Kalimantan Timur.

Secara etimologi, kata “koordinasi” dalam KBBI *online* berarti “perihal mengatur suatu organisasi atau kegiatan sehingga peraturan dan tindakan yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan atau simpang siur”. Sedangkan menurut Terry dalam Sukarna (2011), koordinasi adalah suatu sinkronisasi yang

tertib dalam upaya untuk memberikan jumlah yang tepat, waktu mengarahkan pelaksanaan yang mengakibatkan harmonis dan tindakan terpadu untuk tujuan lain". Kemudian menurut Handoko (2017:194), koordinasi adalah kegiatan-kegiatan dari satuan-satuan organisasi berbeda dalam kebutuhan integrasi. Kebutuhan koordinasi tergantung pada sifat dan kebutuhan komunikasi dalam pelaksanaan tugas dan derajat saling ketergantungan bermacam-macam satuan pelaksanaannya. Bila tugas-tugas tersebut memerlukan aliran informasi-informasi antar satuan, derajat koordinasi yang tinggi adalah paling baik.

Oleh karena itu, koordinasi dapat dipahami sebagai upaya sinkronisasi yang tertib atau tidak simpang siur dalam berbagai kegiatan satuan organisasi, yang berkenaan dengan komunikasi dalam pelaksanaan tugas sehingga terjadi harmonisasi dalam setiap tindakan secara terpadu untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan demikian dapat dipahami bahwa koordinasi memiliki peranan yang sangat penting agar terjadi keserasian dalam aktivitas suatu organisasi, dalam penelitian ini ada DKP Provinsi Kalimantan Timur dan DKP pada tingkat Kabupaten/Kota.

Berdasarkan pemahaman tersebut, maka studi koordinasi dalam penelitian ini merupakan suatu penelitian ilmiah mengenai bentuk koordinasi yang dilakukan oleh DKP Provinsi Kalimantan Timur kepada Dewan Ketahanan Pangan kabupaten dan kota dalam menjaga ketahanan pangan daerah dan mengurangi daerah yang berstatus rawan pangan seperti di daerah perkotaan, atau daerah kabupaten yang memiliki banyak kawasan eksplorasi Sumber Daya Alam (SDA) seperti pertambangan batu bara. Sehingga terjadi sinkronisasi dan harmonisasi dalam pemenuhan pangan di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

## ***2. Ketahanan Pangan***

Menurut laman resmi Badan Urusan Logistik (Bulog) Republik Indonesia (2021) bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu Hak Asasi Manusia, sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 27 maupun dalam Deklarasi Roma (1996). Pertimbangan tersebut mendasari terbitnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Sebagai kebutuhan dasar dan salah satu Hak Asasi Manusia, pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidak-stabilan ekonomi. Berbagai gejolak sosial dan politik dapat juga terjadi jika ketahanan pangan terganggu. Kondisi pangan yang kritis ini bahkan dapat membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas nasional. Sedangkan dalam pandangan Saliem dan Ariani (2002) pangan merupakan kebutuhan dasar manusia untuk dapat hidup dan melakukan aktivitas sehari-

hari, sedang ketahanan pangan adalah jaminan bagi manusia untuk hidup sehat dan bekerja secara produktif.

Sehingga sangat jelas, bahwa kehidupan akan berjalan dengan baik, jika setiap warga dapat memenuhi kebutuhan pangan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan fisiologis manusia yakni untuk hidup dan pemenuhan gizi. Diantara sekian banyak tugas negara dalam melakukan pelayanan publik adalah dengan melahirkan kebijakan yang didukung dengan program kerja dan kegiatan yang memberikan pemenuhan kebutuhan pokok, khususnya pangan. Meskipun dalam produksi pangan tentunya juga melibatkan masyarakat terutama kelompok tani dan nelayan.

Laman resmi Bulog (2021) juga menjelaskan mengenai pengertian ketahanan pangan yang tidak lepas dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Disebutkan bahwa Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa UU Pangan bukan hanya berbicara tentang ketahanan pangan, namun juga memperjelas dan memperkuat pencapaian ketahanan pangan dengan mewujudkan kedaulatan pangan (*food sovereignty*) dengan kemandirian pangan (*food resilience*) serta keamanan pangan (*food safety*). "Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal". Sedangkan menurut laman resmi Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian Republik Indonesia (2021) menjelaskan makna visi BKP adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Sehingga dalam penelitian ini ketahanan pangan merupakan suatu usaha pemenuhan pangan baik secara kuantitas dan kualitas yang tinggi, sehingga terjadi kestabilan harga terutama pada hari besar atau momen tertentu, seperti saat cuaca ekstrim, gagal panen, dan lain sebagainya. Dimana pada tingkat daerah, termasuk di wilayah Provinsi Kalimantan Timur menjadi tanggungjawab Dewan Ketahanan Pangan (DKP) Provinsi Kalimantan Timur bersama instansi terkait hingga wilayah Kabupaten/Kota.

## METODE

Mengacu pada latar belakang masalah atau fenomena penelitian dan tujuan yang ditetapkan, maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan sifat deskriptif. Dengan demikian, maka penelitian ini menyajikan data dalam bentuk deskriptif dengan narasi berbentuk informasi dan kata-kata dengan sedikit tambahan data berupa angka seperti persentase sebagai penguat informasi dan fakta.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa *purposive sampling* atau informan yang dipandang mampu memberikan data dan informasi sesuai dengan tema dan tujuan penelitian, yakni dari Tim Kelompok Kerja DKP Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Holtikultura Provinsi Kalimantan Timur, DKP Kota Samarinda, DKP serta Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur, dan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Paser.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, maka di peroleh sejumlah informasi berkaitan dengan koordinasi DKP Provinsi Kalimantan Timur kepada DKP Kabupaten/Kota.

### **Koordinasi Vertikal dan Horizontal**

Pada dasarnya koordinasi terjadi dengan pola vertikal dan horizontal. Dalam konteks koordinasi vertikal tentu saja koordinasi yang dilakukan oleh DKP Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada DKP Kabupaten/Kota, begitupun sebaliknya. Dengan koordinasi yang baik terjadi harmonisasi dan sinergitas kebijakan dan program melalui kegiatan berorientasi pencapaian ketahanan pangan di wilayah Kalimantan Timur. Mengingat dalam kenyataan bahwa dari 10 Kabupaten dan Kota yang ada, tidak semua wilayah memiliki lahan yang cocok untuk keperluan produksi pertanian dan peternakan, serta tidak semua Kabupaten/Kota memiliki sungai, pantai dan laut untuk ketersediaan ikan dan sumber pangan lain dari potensi perairan.

Hingga saat ini bahwa kemampuan pemenuhan kebutuhan pasar dan masyarakat di Kalimantan Timur maksimal hanya mampu memenuhi kebutuhan beras sebanyak 75 persen, selebihnya dalam rangka memenuhi kekurangan pasokan di datangkan dari pulau jawa terutama Jawa Timur dan Jawa Tengah, kemudian dari pulau Sulawesi baik itu Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah, selain itu dari Kalimantan Selatan dan Kalimantan Utara. Selain beras, sejumlah daerah tetangga juga memasok sejumlah kebutuhan pangan lainnya, dan kebutuhan bawang merah dari pulau jawa hingga 90 persen lebih.

Sebagai upaya untuk meningkatkan produksi pangan di Kalimantan Timur, maka DKP Provinsi Kalimantan Timur yang didukung oleh Tim Kelompok Kerja

telah berupaya membangun koordinasi kepada DKP Kabupaten/Kota dengan baik, dan memetakan wilayah Kabupaten/Kota mana saja yang berpotensi pada salah satu atau sejumlah tanaman pangan atau peternakan untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pangan dalam rangka ketahanan pangan. Sebagai contoh daerah Kutai Timur memiliki potensi buah pisang yang telah memiliki standar ekspor dan telah di ekspor ke Malaysia, begitupun dengan daerah Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara sangat cocok untuk padi sawah.

Sedangkan koordinasi horizontal terjadi dalam rangka mendukung terjadinya koordinasi vertikal. Dalam hal ini adalah koordinasi dengan *stakeholder* terkait dan masih memiliki tugas pokok dan fungsi yang berkenaan dengan kebutuhan dan ketahanan pangan. Koordinasi dengan sesama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta pihak Kelurahan dan Pemerintah Desa yang memiliki lahan dan Sumber Daya Manusia (SDM) yakni petani untuk memproduksi dan mengembangkan program pertanian.

Bentuk koordinasi dengan OPD lain yang telah dilakukan melalui penyusunan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) yakni sinkronisasi program kerja dan kegiatan yang berorientasi pada ketahanan pangan, baik nabati maupun hewani. Mulai dari pengadaan benih dan bibit, pupuk, pakan hingga pemasaran. Jika dalam keadaan surplus dapat melalui Badan Urusan Logistik (Bulog) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai bagian dari Pemerintah Daerah. Untuk pada tingkat pemerintahan desa dan kelurahan sejumlah program memaksimalkan peran koperasi, UMKM, hingga Badan Usaha Milik Desa/Kampung (BUMDes/K) serta didukung oleh Kelompok Tani maupun Kelompok Wanita Tani (KWT) yang terbimbing dan terlatih oleh para petugas Penyuluh Lapangan Pertanian (PPL).

Untuk itu diperlukan koordinasi secara vertikal dan horizontal dengan baik dengan memperhatikan potensi daerah masing-masing. Disamping itu, DKP Provinsi Kalimantan Timur juga melakukan koordinasi dengan Badan Ketahanan Pangan (BKP) nasional, sehingga memperoleh berbagai program ketahanan pangan, seperti Program Lumbung Pangan Masyarakat (LPM), Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)/Pekarangan Pangan Lestari (P2L), dan Obor Pangan Lestari (OPAL).

### **Dukungan Stakeholders**

Sebagaimana sajian hasil penelitian mengenai koordinasi vertikal dan horizontal di atas, maka dapat dipahami bahwa dukungan *stakeholders* terkait sangat penting, bahkan bukan hanya dari OPD hingga Kelurahan dan Pemerintahan Desa. Peran pemuda desa juga sangat vital hingga sejauh ini, seperti di Kecamatan Kaubun, para pemuda menjadi motor penggerak pertanian yang menggunakan teknologi tepat guna dari proses pengolahan tanah, penanaman, hingga proses akhir, baik padi, sayuran, dan buah pisang.

Peran *stakeholders* sangat terasa karena adanya koordinasi yang baik dilakukan oleh DKP Kabupaten/Kota dalam program ketahanan pangan nasional yang dikembangkan di sejumlah wilayah Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur. Hingga saat ini, termasuk di masa pandemi covid-19, koordinasi terus dilakukan melalui aplikasi dalam jaringan (*daring*) dan tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan. Meskipun demikian, tidak mengurangi nilai komunikasi sebagaimana kegiatan koordinasi yang dilakukan sebelum masa pandemi covid-19.

Dukungan program kerja dan kegiatan tetap ada, meskipun pada beberapa *stakeholders* terjadi pengurangan anggaran. Akan tetapi program kerja seoptimal mungkin dilakukan dalam rangka ketahanan pangan dan memenuhi kesejahteraan masyarakat. Dukungan para *stakeholders* tersebut diantaranya Dinas Pertanian berkenaan dengan kemampuan produksi pangan, Dinas Peternakan berkenaan dengan kemampuan produksi hewani, Dinas Kesehatan berkenaan dengan peningkatan nilai gizi dan kesehatan masyarakat, serta sejumlah Organisasi Perangkat daerah (OPD) terkait, hingga dukungan dari Pemerintah Desa dimana lokasi pertanian lebih banyak tersedia.

### **Dukungan dan Peran Tim Kelompok Kerja (Pokja)**

Koordinasi DKP Provinsi Kalimantan Timur didukung oleh Tim Pokja yang dengan pengalaman dan keahlian dapat memberikan kontribusi yang mendukung dan memantapkan ketahanan pangan, mengevaluasi kebijakan dan program yang dilaksanakan pemerintah dan memberikan masukan yang memebrikan masukan implementatif solutif. Keharmonisan *stakeholders* DKP Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama DKP Kabupaten/Kota menjadi sangat penting mengingat ketahanan pangan bersifat multi disiplin, multi sektor dan multi dimensi.

Adapun tugas Pokja Ahli diantaranya adalah merumuskan bahan kebijakan di bidang pemantapan ketahanan pangan di daerah yang meliputi kegiatan di bidang penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman pangan, keamanan pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi. Sedangkan Pokja Teknis bertugas diantaranya menyiapkan bahan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan provinsi, menyiapkan bahan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam menyelenggarakan ketahanan pangan, menyiapkan bahan kebijakan untuk melakukan evaluasi dan pengendalian perwujudan ketahanan pangan provinsi setiap enam bulan sekali. Kedua jenis Pokja tersebut tentu saja bertanggungjawab kepada Ketua Harian DKP Provinsi Kalimantan Timur, dan kemudian di laporkan secara bersama-sama kepada Gubernur Kalimantan Timur.

## **KESIMPULAN**

Mengacu pada uraian sajian hasil dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya koordinasi terjadi dengan pola vertikal dan horizontal. Pada dasarnya koordinasi terjadi dengan pola vertikal dan horizontal. Koordinasi vertikal tentu saja koordinasi yang dilakukan oleh DKP Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada DKP Kabupaten/Kota, begitupun sebaliknya. Sedangkan koordinasi horizontal terjadi dalam rangka mendukung terjadinya koordinasi vertikal yakni koordinasi dengan *stakeholders* terkait hingga tingkat pemerintahan desa dan kelurahan dimana lahan dan SDM petani tersedia.
2. Peran *stakeholders* sangat terasa karena adanya koordinasi yang baik dilakukan oleh DKP Kabupaten/Kota dalam program ketahanan pangan nasional yang dikembangkan di sejumlah wilayah Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur. Hingga saat ini, termasuk di masa pandemi covid-19, koordinasi terus dilakukan melalui aplikasi dalam jaringan (daring) dan tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan. Meskipun demikian, tidak mengurangi nilai komunikasi sebagaimana kegiatan koordinasi yang dilakukan sebelum masa pandemi covid-19. Dukungan program kerja dan kegiatan tetap ada, diantaranya Dinas Pertanian berkenaan dengan kemampuan produksi pangan, Dinas Peternakan berkenaan dengan kemampuan produksi hewani, Dinas Kesehatan berkenaan dengan peningkatan nilai gizi dan kesehatan masyarakat, serta sejumlah Organisasi Perangkat daerah (OPD) terkait lainnya.
3. Koordinasi DKP Provinsi Kalimantan Timur didukung oleh Tim Pokja Ahli dan Tim Pokja Teknis yang dengan pengalaman dan keahlian dapat memberikan kontribusi yang mendukung dan memantapkan ketahanan pangan, mengevaluasi kebijakan dan program yang dilaksanakan pemerintah dan memberikan masukan yang memberikan masukan implementatif solutif. Keharmonisan *stakeholders* DKP Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama DKP Kabupaten/Kota menjadi sangat penting mengingat ketahanan pangan bersifat multi disiplin, multi sektor dan multi dimensi.

## **PERSANTUNAN**

Ucapan terima kasih mendalam disampaikan kepada Ketua, Anggota, Tim Pokja Ahli dan Pokja Tekhnis DKP Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Holtikultura Provinsi Kalimantan Timur, DKP Kota Samarinda, DKP serta Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur, dan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Paser beserta jajaran yang bersedia memberikan data dan informasi yang sangat bermanfaat untuk penguatan fakta dalam penelitian ini. Begitu pun sebaliknya, semoga penelitian ini dapat menjadi bahan akademik untuk

pengambilan kebijakan dan keputusan yang bermanfaat bagi ketahanan pangan di masa mendatang. Semoga kerjasama ini dapat terus berlanjut untuk kemajuan dan perwujudan visi dan misi pembangunan Provinsi Kalimantan Timur.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. 2021. *Arah Kebijakan Badan Ketahanan Pangan*. <http://bkp.pertanian.go.id/blog/post/arah-kebijakan-dan-strategi-bkp>. Diakses pada 13 Maret 2021 pukul 16.34 WITA.
- Connolly, Peter. (2004). *Aneka Pendekatan Studi Agama*. Yogyakarta: LkiS.
- Handoko, T. Hani. (2016). *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Humas BKP. (2021). *Visi Misi Badan Ketahanan Pangan*. <http://bkp.pertanian.go.id/visi-dan-misi>. Diakses pada 13 Maret 2021 pukul 22.06 WITA.
- Humas Bulog RI. (2021). *Ketahanan Pangan*. <http://www.bulog.co.id/ketahananpangan.php>. Diakses pada 13 Maret 2021 pukul 16.10 WITA.
- Humas Kelurahan Semanu. (2018). *Madyapuro Bermartabat, Gemah Ripah Loh Jinawi, Makmur Agawe Santoso*. Kelurahan Semanu Kabupaten Gunungkidul. <https://www.semanu.des.id/first/artikel/212-MADYAPURO-BERMARTABAT--GEMAH-RIPAH-LOH-JINAWI--MAKMUR-AGawe-SANTOSO> Diakses pada 13 Maret 2021 pukul 16.20 WITA.
- KBBI Online. (2021). *Studi*. <https://kbbi.web.id/studi>. Diakses pada 13 Maret 2021 pukul 22.06 WITA.
- Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Timur.
- Saliem, Handewi Purwati, Mewa Ariani. (2002). Ketahanan Pangan, Konsep dan Strategi. *Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi*. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Vol.20, No.1, 2002. DOI: <http://dx.doi.org/10.21082/fae.v20n1.2002.12-24>
- Suharsimi, Arikunto. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sukarna. (2013). *Dasar-dasar Manajemen*. Bandung: Mandar Maju.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

## PROFIL PENULIS

**Abd Rachim AF**, merupakan dosen sejak 1993 pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, sejak tahun 2009 mutasi dari PNS Pemerintah Kota Samarinda menjadi PNS dpk Koperatis Wilayah XI (LLDIKTI11) Kalimantan dan menjadi Dosen Tetap pada Program Studi Perbankan dan Keuangan Syari'ah. Menyelesaikan pendidikan jenjang

sarjana bidang Studi Pembangunan pada tahun 1982 dari Universitas Mulawarman, pendidikan jenjang magister di bidang Perencanaan Lingkungan pada tahun 1992 dari Universitas Indonesia, pendidikan jenjang doktoral di bidang Studi Pembangunan pada tahun 2005 dari Universitas Airlangga. Meraih jabatan fungsional sebagai Guru Besar dalam Ilmu Ekonomi Pembangunan dan Keuangan Negara/Daerah pada tahun 2009. Sejumlah penelitian mengenai kebijakan publik dan keorganisasian telah dihasilkan dan dimuat pada berbagai jurnal, baik nasional maupun internasional.

**Zulkifli**, merupakan dosen tetap pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, sejak tahun 2017. Menyelesaikan Pendidikan jenjang Sarjana Manajemen pada tahun 2012 dari Universitas Mulawarman, pendidikan jenjang magister manajemen bidang korporasi pada tahun 2016 dari Universitas Mulawarman. Juga aktif sebagai Konsultan Pendamping Koperasi dan UMKM Kaltim, 2018-2020, dan memiliki Sertifikasi Pendamping UMKM, 2020.